



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 173 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 109
TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN
BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Nama-nama Pejabat Penatusahaan Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna;

b. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Nama Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

[Handwritten signature]

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Nama Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Menetapkan Nama Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, adalah sebagai berikut:
- menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang Pengguna;
 - menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang;
 - meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang Pengguna; dan
 - memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan.
- KEEMPAT : Tugas Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, adalah sebagai berikut:
- membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari APBD dan perolehan lainnya yang sah;

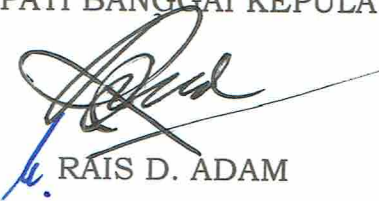
- c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang Pengguna;
- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- f. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- g. memberi label barang milik daerah;
- h. melakukan stok opname barang persediaan; dan
- i. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna dan laporan barang milik daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 April 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan deengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 173 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA-NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA OPD	JABATAN		TMT
		PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PENGGUNA	PENGURUS BARANG PENGGUNA	
1	Sekretariat DPRD	Siti Naidah, S. Sos Nip. 19830521 200801 2 004	Yunanto, S. Sos Nip. 19781113 200701 1 006	3 Januari 2019
2	Inspektorat	Novario JS. Supu, SH.,CSEP Nip. 19801104 201001 1 012	Ulvina B. Mappa Nip. 19861217 201411 2 001	3 Januari 2019
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hasriadi H. Banguno, S.IP Nip. 19781017 200902 1 004	Kusbianto Yusuf, S. IP	3 Januari 2019
4	Dinas Perikanan	Saiful Magulia Nip. 19840723 201212 1 003	Fikri Te'ene, S. Kom	3 Januari 2019
5	Dinas Kesehatan	Irma Labuan, SKM, M. Kes Nip. 19780831 200502 2 005	Nordison Soolani Nip. 19821122 200502 1 002	3 Januari 2019
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Adriel Molutan, S. IP Nip. 19770907 200701 1 010	Yeplin Yatulan, S.Pd.	3 Januari 2019
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indra Totondeng, S.Sos Nip. 19870520 201101 1 011	Indra Totondeng, S.Sos Nip. 19870520 201101 1 011	3 Januari 2019
8	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Supianton Lasimu, SE Nip. 19820127 201411 1 001	Lelyana Barounta Nip. 19830508 200801 2 009	3 Januari 2019
9	Dinas Pariwisata	Hayati Tiah, S. Hut Nip. 19800720 200801 2 013	Jemmy A.S. Makahekung Nip. 19821012 201412 1 002	3 Januari 2019

h.ac

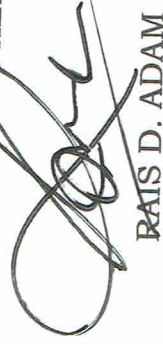
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Asriati Sombali, SE Nip.19810920 200902 2 009	Hasbi Lamiada Nip.19840824 201410 1 001	3 Januari 2019
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Cipto, S. Sos Nip. 19820905 200801 1 003	Satrianto H. Ali, S.Si.	3 Januari 2019
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sylvia Oktriana Svenlie, SE Nip. 19820606 201101 2 005	Alfiadi	3 Januari 2019
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sairah, A. Md Nip. 19730222 200012 2 001	Erik Rustandi Anwar, SH	3 Januari 2019
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Abd. Rifai Dg. Palenna, S. IP Nip. 19820730 200801 1 006	Haeruddin Yampunggene Nip. 19770331 200801 1 003	3 Januari 2019
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bece Matru, SM Nip. 19820923 200701 2 005	Suhirno AR. Luande Nip. 19850412 201411 1 002	3 Januari 2019
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kurniasih Sahido, S.Ag Nip.19760311 201001 2 009	Rosita Muada Nip.19811015 200801 2 008	3 Januari 2019
17	Dinas Pertanian	Astuti Injte Dahlan, SP Nip. 19850515 201001 2 016	Siti Aisyah	3 Januari 2019
18	Dinas Ketahanan Pangan	Rodia Adam, SP Nip. 19830214 200801 2 008	Willyanto Feky Talemo, A.Md. Kom Nip. 19850925 201001 1 014	3 Januari 2019
19	Dinas Sosial	Osniel Tibinge, S. Sos Nip. 19840616 200801 2 04	Sahdin Tumia Nip. 19820907 201411 1 004	3 Januari 2019
20	Dinas Perhubungan	Dolfi Dalim, SH Nip. 19861024 201001 1 001	Martoyanus Yabangikon Nip. 19770324 200701 1 013	3 Januari 2019
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	Sukrianto Pania, S. Pd Nip. 19800719 200902 1 003	Jamaludin, S. Sos	3 Januari 2019
22	Dinas Lingkungan Hidup	Fitriah Bidalo, S. Si Nip. 19861220 200902 2 003	Fandi Asri, ST Nip. 19880217 201503 1 004	3 Januari 2019
23	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanian	Murtisari Adel, ST Nip. 19771124 200701 2 006	Sunaryati Lamai, S. IP	3 Januari 2019

l.a

24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bardin Masikon, SE Nip. 19771110 200902 1 005	Surahman A. Duhuman, S. Kom	3 Januari 2019
25	Badan Pendapatan Daerah	Tuti Handayani, SH Nip. 19810322 200901 2 003	Moh. Rizal Sahran, A.Md Nip. 19810413 200901 1 008	1 April 2019
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Adnan Hi. Tasaka, ST Nip. 19770515 201001 1 018	Yevi H. Kamindang, S. SPi	1 April 2019
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	Zulkiflin Nip. 19831023 200801 1 006	3 Januari 2019
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ikbal Patahe, SE Nip. 19790619 201101 1 005	Sumiarto S. Yadalia	3 Januari 2019
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Suparto Arsat Nip. 19850403 201411 1 001	Susilawati Bidul, S. Sos	3 Januari 2019
30	Rumah Sakit Umum Daerah Trihora	Al Zikri Alia, S. Kep Nip. 19880415 201001 1 002	Supardi Tanggulang, SE	3 Januari 2019
31	Bagian Umum Setda	Rudin Neeke, SH Nip. 19781208 200604 1 019	Siti Rahmi, S.AP	3 Januari 2019
32	Bagian Hukum Dan Perundang-undangan Setda	-	Abd. Jalil Tangkudung Nip. 19851013 201412 1 001	3 Januari 2019
33	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda	-	Samsul Bakhri N.	3 Januari 2019
34	Bagian Humas Dan Protokol Setda	-	Widya Kristiani, S.IP Nip. 19870904 200604 2 001	3 Januari 2019
35	Bagian Ekonomi Setda	-	Sri Anggraini Koida, A.Md.Kom	3 Januari 2019
36	Bagian Adm. Pembangunan Setda	-	Stenfandi Kumali, S.Ikom	3 Januari 2019
37	Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda	-	Adrian Dilengan, SE	3 Januari 2019
38	Bagian Kesramas Setda	Saptono Esa, S. Pd Nip. 19780717 201411 1 003	Supriyadi Arwi, SH	3 Januari 2019

39	Bagian ULP setda	Jelly Novita Silanno, S. Sos., M. Msip Nip. 19760214 200012 2 001	Srisulistawati Manga Nip. 19840329 201412 2 002	3 Januari 2019
40	Kecamatan Totikum	Bustamin Beddulah, S. Sos Nip. 19800520 200701 1 013	Irmayani Bonenehu Nip. 19830819 200701 2 005	3 Januari 2019
41	Kecamatan Totikum Selatan	Afrianto A. Aladjai Nip. 19821215 200901 1 003	Afrianto A. Aladjai Nip. 19821215 200901 1 003	3 Januari 2019
42	Kecamatan Tinangkung	Nur Aeni Y., S. STP Nip. 19199407 201609 2 001	Moh. Saleh Nip. 19800128 201411 1 001	3 Januari 2019
43	Kecamatan Tinangkung Selatan	Isnawati Ihwan Talla Nip. 19790427 201411 2 001	Sumar Onde Nip. 19800128 201411 1 001	3 Januari 2019
44	Kecamatan Tinangkung Utara	Hengki Ambado Nip. 19750325 200701 1 010	Sahril Abijal Nip. 19771214 201411 1 003	3 Januari 2019
45	Kecamatan Liang	Tri Herliyanto Surdana Nip. 19820727 200502 1 005	Haris Nonsi Nip. 19771214 201411 1 003	3 Januari 2019
46	Kecamatan Peling Tengah	Ramli R. Monsoling Nip. 19771214 201411 1 003	Tarsan T. Badarun Nip. 19771214 201411 1 003	3 Januari 2019
47	Kecamatan Bulagi		Salmon Saidi Nip. 19771214 201411 1 003	3 Januari 2019
48	Kecamatan Bulagi Selatan	Abd. Kunut Balalio, S. Pd. Nip. 19860603 200801 1 002	Welpina Sapang Nip. 19790330 201212 2 001	3 Januari 2019
49	Kecamatan Bulagi Utara	Hajis Hadjim, S. Sos Nip. 19710319 201001 1 004	Ones S. Maasi, S. Sos Nip. 19711229 201101 1 004	1 April 2019
50	Kecamatan Buko	Abu Bakar Yanduke, S. Sos Nip. 19811225 200502 1 003	Abu Bakar Yanduke, S. Sos Nip. 19811225 200502 1 003	3 Januari 2019
51	Kecamatan Buko Selatan	Sahrman Datu Adam, SH Nip. 19820625 200102 1 001	Ramdan Dalil Nip. 19811225 200502 1 003	3 Januari 2019

 PIt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM